



Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu :

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Ke empat target utama tersebut di uraikan sebagai berikut :

1. PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Swasembada ditargetkan untuk tiga Komoditas pangan utama yaitu : kedelai, gula dan daging sapi. Agar tercapai swasembada, sasaran produksi kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014 adalah kedelai sebesar 2,70 juta ton biji kering, gula 5,7 juta ton dan daging sapi 546 ribu ton; atau masing-masing meningkat rata-rata 20,05 % per tahun (kedelai), 17,63 % per tahun (gula) dan 7,30 % per tahun (jagung).

Sedangkan swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat berkelanjutan, maka sasaran peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan peningkatan permintaan dalam negeri, kebutuhan stock nasional dan peluang ekspor, maka sasaran produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75,70 juta ton gabah kering giling (GKG) dan jagung 29 juta ton pipilan kering atau masing-masing tumbuh 3,22 % per tahun (padi) dan 10,02 % per tahun (jagung).

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010 – 2014), di samping prioritas pada lima komoditas pangan utama, juga akan dikembangkan 34 komoditas lain sehingga berjumlah 39 komoditas unggulan nasional, yaitu 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan dan 7 komoditas peternakan.

2. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan

pangan. Salah satu upaya peningkatan diversifikasi pangan adalah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yaitu tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3 pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produk lokal, dan di pihak lain konsumsi beras diharapkan turun sekitar 1,5 % per tahun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 menetapkan Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tujuan utama Peraturan Presiden tersebut adalah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan, maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, dengan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Disamping itu, juga ada ketersediaan aneka pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk juga adanya penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

3. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN EKSPOR

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good Manufacturing Practices).

Pada akhir tahun 2014, semua produk pertanian organik, fermentasi kakao, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib



Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Kondisi saat ini, 80 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20 persen dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Indikatornya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.

Produk berbasis sumberdaya lokal yang dijadikan prioritas adalah susu yang selama ini impornya mencapai 73 % untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2014, diupayakan 50 % kebutuhan susu segar dipasok dari produksi dalam negeri. Untuk mengurangi besarnya impor gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal, yang ditargetkan pada akhir tahun 2014 sudah bisa mensubstitusi 20 % impor gandum/terigu impor. Untuk kakao, ditargetkan pada akhir tahun 2014 semua kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi dari produk dalam negeri dan 50 % produk kakao dalam bentuk fermentasi bermutu sesuai SNI.

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi, seperti sawit, karet, kakao dan daging ayam serta komoditas dalam kelompok emerging produk yang meliputi buah tropika (mangga, manggis, pisang), produk biofarmaka, tanaman hias, anggrek dan non anggrek serta minyak atsiri. Sedangkan jeruk, susu (bersama tepung-tepungan) ditujukan untuk substitusi impor. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.

4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara



otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan petani.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan per kapita tersebut dapat meningkat menjadi Rp 7,93 juta per tahun. Hal ini berarti setiap tahun harus dipeyakan kenaikan pendapatan 11,1 persen per tahun.

Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usaha tani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual. Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual juga meningkat atau paling tidak konstan. Oleh karena itu, hal fundamnetal yang perlu di upayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka Kementerian Pertanian menyusun sejumlah rencana aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani, antara lain :

1. Tetap dilanjutkannya subsidi, baik subsidi pupuk, benih/ bibit, dan kredit/bunga.
2. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.
3. Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG khususnya untuk komoditi beras pada saat panen.
4. Melanjutkan dan menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang.
5. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan *captive market* bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.
7. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair market*).

- **Sumber data : Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014)**

Informasi lebih lanjut hubungi :
Biro Hukum dan Informasi Publik
Ged. PIA, Kampus Kementan
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta 12550
Tlp./Fax. (021) 7816485
Website : <http://www.deptan.go.id>